



PEMERINTAH DESA KERTOSARI

DOKUMEN

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA**

(RPJMDesa)

TAHUN 2020- 2025

**PEMERINTAH DESA KERTOSARI
KECAMATAN PAKUSARI KABUPATEN JEMBER**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan menggunakan pola perencanaan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk Periode 6 (enam) tahun yang disusun secara partisipatif sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan rencana strategis desa yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, program dan kegiatan pembangunan desa. Dokumen RPJMDes ini juga diharapkan sebagai pedoman di dalam melakukan pengawasan / pengendalian pembangunan di Desa, sehingga setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan dengan benar, baik pada Pemerintahan Desa maupun Masyarakat.

Akhirnya, besar harapan kami semoga Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) ini dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi acuan pembangunan di Desa. Agar pembangunan di Desa dapat berjalan dengan baik sesuai / mendekati apa yang masyarakat rencanakan. Maka dukungan dari semua pihak yang berkompeten senantiasa diharapkan untuk perbaikan.

Kertosari , 17 Januari 2020

KEPALA DESA KERTOSARI



BUDI WIJAYANTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	1
3. Tujuan	2
BAB II : PROFILDESA.....	3
1. Sejarah Desa.....	3
2. kondisi Umum Desa	6
3. Kelembagaan Desa	8
4. Masalah dan Potensi Desa.....	8
BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJMDesa.....	9
1. Pengkajian Keadaan Desa	9
2. Musyawarah Desa RPJM Desa	9
BAB IV : VISI DAN MISI.....	10
1. VisiDesa.....	20
2. MisiDesa.....	20
3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	20
BAB V : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA.....	21
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	21
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	21
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.....	21
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	21
BAB VI : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA DAN PROGRAM KEGIATAN.....	21
1. Arah Kebijakan Keuangan Desa.....	21
2. Program dan kegiatan Indikatif.....	21
BAB VI : PENUTUP.....	23
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Perdes Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)	21
2. Berita Acara Kesepakatan Kepala Desa dan BPD Tentang Penetapan Perdes Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)	21
3. Daftar Gagasan dan Usulan Dusun.....	21
4. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.....	21
5. Matrik Kegiatan RPJMDes 6 Tahun	21
6. Matrik Pelaksanaan Kegiatan Per Tahun	21
7. Berita Acara Hasil Pengkajian Keadaan Desa	21
8. Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes	21
9. Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJMDes	21
10. Berita Acara Musrenbangdes Penyusunan Rancangan RPJMDes	21

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa/Kota, maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun.

RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat Desa, karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem.

2. LANDASAN HUKUM.

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kertosari didasarkan pada Peraturan dan Perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);

3. TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Desa Kertosari ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJM Desa :

- a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kabupaten.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Desa Kertosari
- c. Sebagai masukan penyusunan RKPDes dan RAPBDes Desa Kertosari

2. Manfaat RPJM Desa :

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
- b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun.
- c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
- e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

PROFIL DESA

1. SEJARAH DESA

Sejarah Desa Kertosari berdasarkan sebagian bukti-bukti/peninggalan yang terdapat di lingkungan serta menurut sumber cerita dari para sesepuh desa Kertosari dan masyarakat, juga Perangkat Desa/Kepala Dusun yang dapat dipercaya adalah sebagai berikut :

Sejarah Desa Kertosari sama halnya dengan sejarah desa-desa lain. Desa Kertosari berdiri sejak Tahun 1823 yang di pimpin oleh seorang tokoh masyarakat yang bernama Buyut DEMANG SARYO KERTO KUSUMA. Konon Pertama kali beliau yang membabat alas Desa Kertosari.

Beliau juga yang turut menyiarkan Agama Islam dari Dusun satu ke Dusun yang lainnya di Desa Kertosari.

Nama- nama Petinggi Desa atau Kepala Desa yang pernah dan masih menjabat sampai saat ini adalah :

No	Uraian	Masa / Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	DEMANG SARYO KERTO K	1823-1843	Kepala Desa Ke Satu
2	SEBUTDEN	1844-1864	Kepala Desa Ke Dua
3	SARJETI	1865-1855	Kepala Desa Ke Tiga
4	SUBAKIR	1886-1906	Kepala Desa Ke Empat
5	H.ABDUL HAMID	1906-1926	Kepala Desa Ke Lima
6	ARBAINA	1927-1943	Kepala Desa Ke Enam
7	SUNAR GENJAN	1943-1969	Kepala Desa Ke Tujuh
8	P.SHOLEH	1970-1974	Kepala Desa Ke Delapan
9	H.MUSTADI	1975-1977	Kepala Desa Ke Sembilan
10	P.MAT ALI	1977-1981	Kepala Desa Ke Sepuluh
11	SUTARSONO	1982-1994	Kepala Desa ke Sebelas
12	SURIS HARIYANTO	1994-1996	Kepala Desa ke duabelas
13	SUDJONO	1997-2006	Kepala Desa ke tigabelas
14	SUDJONO	2007-2013	Kepala Desa ke Empatbelas
15	BUDI WIJAYANTO	2013 s/d 2019	Kepala Desa ke Lima belas
16	BUDI WIJAYANTO	2019 s/d Sekarang	Kepala Desa ke Enam belas

2. Kondisi Umum Desa

Secara umum letak geografis Desa Kertosari terletak pada wilayah dataran sedang yang luas dan merupakan lembah yang subur, secara umum batas-batas administrasi Desa Kertosari meliputi :

Sebelah Utara	: Desa Sumber Pinang
Sebelah Timur	: Desa Pakusari
Sebelah Selatan	: Desa Mrawan
Sebelah Barat	: Kelurahan Wirolegi

Desa Kertosari memiliki luas wilayah 536.600 Ha, dari segi topografi, Desa Kertosari berada pada bagian timur wilayah Kabupaten Jember yang merupakan daerah pertanian yang subur dan sangat baik untuk pengembangan tanaman pangan.

Dari luas wilayah tersebut diatas terbagi menjadi beberapa kawasan :

No	Uraian	Luas (Ha)
1	2	3
1	Luas Wilayah	536.600
2	Luas Lahan Pertanian	273
3	Luas Lahan Perkebunan	1
4	Luas Ladang/Tegalan	48
5	Luas Pemukiman	143
6	Luas Jalan	10
7	Luas Makam	12
8	Dan Lain-lain	49
Jumlah		536

S/d Tahun 2019

Sedangkan Tanah untuk Fasilitas Perkantoran dan Umum dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Luas (Ha)
1	2	3
1	Tanah Kas Desa	900
	a. Tanah Begkok	9.600
	b. Tanah Titi Soro	-
	c. Kebun Desa	-
	d. Sawah Desa	276.000
2	Lapangan Olah Raga	1.000
3	Perkantoran Pemerintah	250
4	Ruang Publik/Taman Kota	-
5	Tempat Pemakaman Desa/Umum	2.500
6	Tempat Pembuangan Sampah	12.000
7	Bangunan Sekolah/Perguruan Tinggi	1.000
8	Pertokoan	-
9	Fasilitas Pasar	-
10	Terminal	800
11	Tanah Untuk Jalan	10.600
12	Daerah Tangkapan Air	0
13	Usaha Perikanan	0
14	Sutet/Aliran Listrik Tegangan Tinggi	0
Jumlah Total		314.650

s/d Tahun 2015

Jumlah penduduk pada tahun 2019 tercatat sebanyak 11.421 jiwa, terdiri atas laki-laki 5.719 jiwa dan perempuan 5.702 jiwa.

Jumlah Penduduk Di Tiap Dusun Tahun 2019

No	Dusun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK	RTM
		L	P	Total		
1	2	3	4	5	6	7
1	Krajan	2.654	2.589	5.243	1.254	153
2	Sumber Dandang	985	1.017	2.002	595	117
3	Gempal	749	767	1.516	534	100
4	Lamparan	1.331	1.329	2.660	837	169
Jumlah		5.719	5.702	11.421	3.220	539

Pertumbuhan Penduduk S/d Tahun 2019

Jenis Kelamin	Tahun				Pertumbuhan
			2018	2019	
1	2	3	4	5	6
Laki-laki			5.703	5.719	6%
Perempuan			5.558	5.702	5%
Jumlah			11.261	11.421	11%

Sebagian besar penduduk Desa bekerja pada sektor Pertanian disusul sektor lain yang Secara detail mata pencaharian penduduk adalah sebagai berikut :

Mata Pencaharian Penduduk S/d Tahun 2019

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	2	3
1	Petani/Penggarap	4.589
2	Buruh Tani	4.043
3	Peternak	15
4	Pedagang/Bakulan	145
5	Tukang	231
6	Kuli Bangunan	131
7	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	153
8	TNI/Polri	12
9	Karyawan Swasta/Wiraswasta	95
10	Lain-lain	2.087

Tingkat Pendidikan S/d Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan yang ditamatkan	Tahun	Tahun 2018	Tahun 2019	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Belum Sekolah		671	442	Orang
2	Taman Kanak-Kanak		662	855	Orang
3	Tamat SD		854	676	Orang
4	Tamat SLTP		482	998	Orang
5	Tamat SLTA		796	1.082	Orang
6	Diploma D1/D2/D3		280	373	Orang
7	Sarjana S1/S2/S3		152	174	Orang

Jumlah Lembaga Pendidikan S/d Tahun 2019

No	Lembaga Pendidikan	Tahun	Tahun 2018	Tahun 2019	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	TK/PAUD		9	9	
2	SD/Sederajat		5	5	
3	SLTP/Sederajat		1	1	
4	SLTA/Sederajat		1	1	
5	PTN		-	-	
6	PTS		-	-	
7	SLB		-	-	
Jumlah			16	16	

Jumlah Prasarana Kesehatan S/d tahun 2019

No	Uraian	Tahun	Tahun	Tahun 2019
1	2	3	4	5
1	Rumah Sakit Umum Daerah			-
2	Rumah Sakit Umum Swasta			-
3	Puskesmas Umum			-
4	Puskesmas Perawatan			-
5	Puskesmas Pembantu			
6	Poliklinik/Balai Pengobatan			1
7	Apotik			1
8	Posyandu			10
9	Toko Obat			
10	Balai Pengobatan Masyarakat Swasta			-
11	Gudang Penyimpanan Obat			-
12	Rumah/Praktek Dokter			2
13	Rumah Bersalin			1
14	Balai Kesehatan Ibu dan Anak			-
15	Rumah Sakit Mata (Khusus)			-
16	Poskesdes			-
17	Poskesling			-
18	Poskestren			-
19	Polindes			1

Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas Tahun 2019

No	Uraian	Satuan (Ha)	Satuan (Ton/Ha)
1	2	3	4
1	Padi Sawah	147	147
2	Padi Ladang	-	-
3	Jagung	8	8
4	Kacang Kedelai	-	-
5	Kacang Tanah	-	-
6	Kacang Panjang	-	-
7	Ubi Kayu	-	-
8	Ubi Jalar	-	-
9	Cabai	-	-
10	Tomat	-	-
11	Sawi	-	-
12	Kentang	-	-
13	Kubis	-	-
14	Wortel	-	-
15	Rumah Sakit Mata (Khusus)	-	-
16	Poskesdes	-	-
17	Poskesling	-	-
18	Poskestren	-	-
19	Polindes	-	-

Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-buahan Tahun 2019

No	Uraian	Satuan (Ha)	Satuan (Ton/Ha)
1	2	3	4
1	Jeruk		
2	Alpoket		
3	Mangga	1	1
4	Rambutan	1	1
5	Manggis		
6	Pepaya	1	1
7	Belimbing		
8	Durian		
9	Pisang		
10	Semangka		
11	Melon		
12	Anggur		

Luas Dan Hasil Perkebunan Menurut Jenis Komoditas Tahun 2019

No	Uraian	Swasta/Negara		Rakyat	
		Luas (Ha)	Hasil (Kw/ Ha)	Luas (Ha)	Hasil (Kw/ Ha)
1	2	3	4	5	6
1	Kelapa			6	20.000.000
2	Kopi				
3	Cengkeh				
4	Coklat			7	12.000.000
5	Tembakau			50	40.000.000
6	Tebu			60	65.000.000
7	The				
Jumlah					137.000.000

Jenis dan Produksi Kehutanan Tahun 2019

No	Uraian	Produksi (Per Tahun)	Satuan (M ³ , Liter, Ton)
1	2	3	4
1	Kayu Sengon	20.000	
2	Madu		
3	Bambu		
4	Jati		
5	Cemara		
6	Mahoni		

Jumlah Populasi Ternak Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah Pemilik		Jumlah Populasi	
		Tahun Lalu	Tahun Ini	Tahun Lalu	Tahun Ini
1	2	3	4	5	6
1	Sapi	4	8	200	420
2	Kerbau				
3	Ayam Kampung				
4	Ayam Broiler	7	12	20.000	38.000
5	Bebek				
6	Kambing	5	9	120	200
7	The				
Jumlah					38.620

Jenis Dan Alat/Sarana Produksi Budidaya dan Alat Tangkap Ikan Laut, Payau Dan Ikan Air Tawar Tahun 2019

No	Uraian	Produksi (Per Tahun)	Satuan (Ha, Unit, Ha/M ²)
1	2	3	4
1	Keramba Laut		
2	Tambak		
3	Jermal		
4	Pancing		
5	Pukat		
6	Jala		
7	Keramba Tawar		
8	Empang/Kolam		
9	Danau		
10	Tawar		
11	Sungai		
12	Sawah		
13	Jala		
14	Pancingan		

Produksi Bahan Galian Tahun 2019

No	Uraian	Pengelola/ Pemilik	Kapasitas Produksi
1	2	3	4
1	Batu Kali		
2	Batu Gunung	25	
3	Batu Kapur		
4	Pasir	30	
5	Pasir Batu		
6	Minyak Bumi		
7	Gas Alam		
8	Garam		

Sumber Air Bersih Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah (Unit)	Pemanfaat (KK)	Kondisi (Baik/ Rusak)
1	2	3	4	5
1	Mata Air			
2	Sumur Gali			
3	Sumur Pompa	1		
4	Hidran Umum			
5	PAM	1		
6	Pipa			
7	Sungai			
8	Embun/Telaga/Danau			
9	Bak Penampungan Air Hujan			
10	Beli dari Tangki Swasta			
11	Depo Isi Ulang	4		
12	Sumber Lain			

Potensi Wisata s/d tahun 2019

No	Uraian	Luas	Pemanfaatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Taman Gita Nusa		Sarana OUT Bond	
2				
3				
4				
5				

Kondisi Infrastruktur Irigasi s/d tahun 2019

No	Uraian	Jumlah (Unit)	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan (M)
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Drainase				
	Jalan Desa	30	9	11	3.000
	Jalan Antar Desa	12	5	7	2.300
	Pemukiman	31	25	6	3.500
2	Irigasi				
	Saluran Primer				
	Saluran Skunder				
	Saluran Tersier				
	Pintu Sadap				
	Pintu Air				

Kondisi Infrastruktur Permukiman s/d tahun 2019

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5
1	Rumah Tidak Sehat	49	41	27
2	Rumah Tidak Layak Huni	147	75	49
3				

Kondisi Infrastruktur Perhubungan s/d tahun 2019

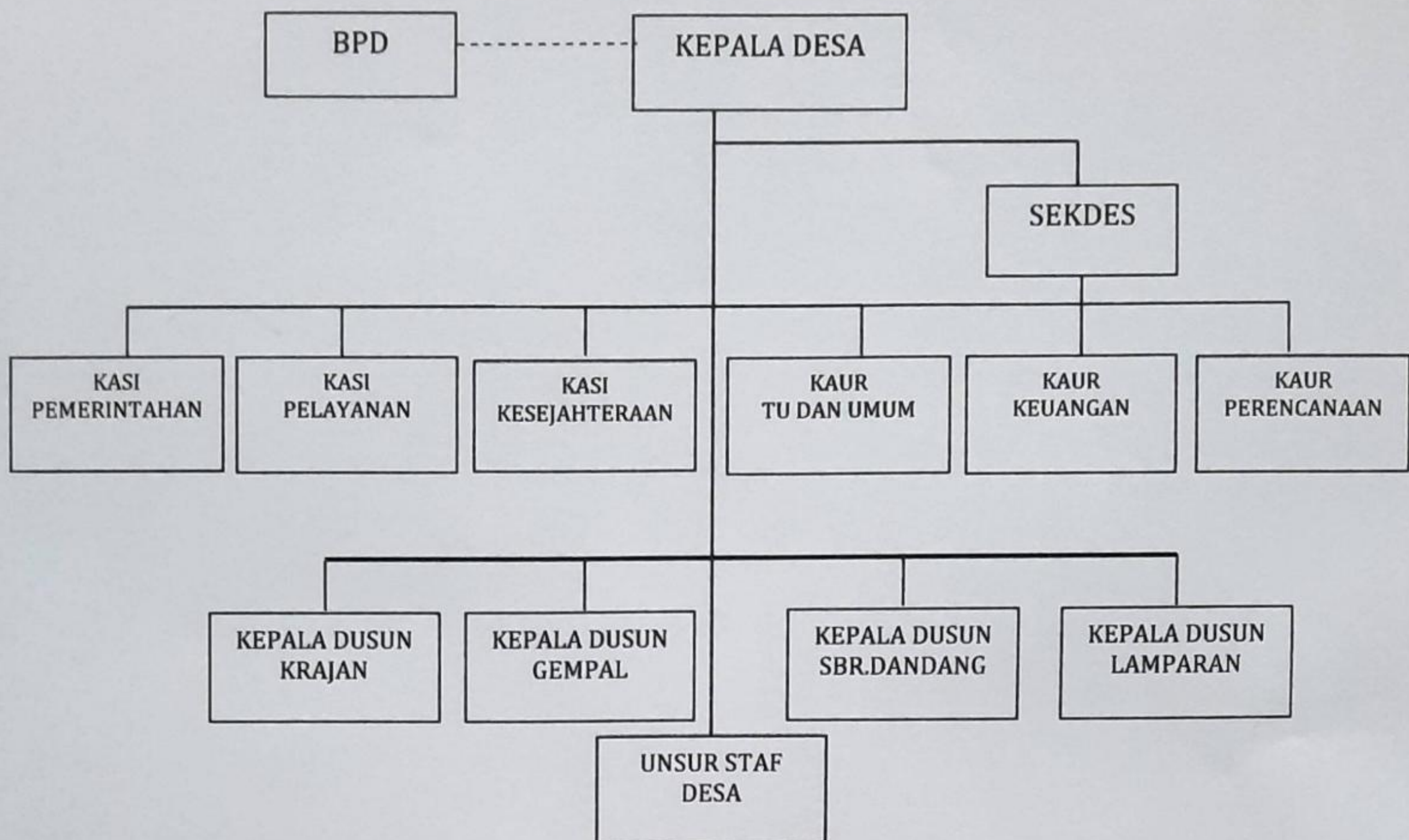
No	Uraian	Jumlah (Unit/ Ruas)	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan (M)
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Jalan Desa				
	Aspal	2			
	Makadam				
	Tanah				
	Sirtu				
	Comblok/Paving/Beton	46			
2	Jalan Antar Desa				
	Aspal				
	Makadam				
	Tanah				
	Sirtu				
	Comblok/Paving/Beton				

3.KELEMBAGAAN DESA

Data Lembaga Pemerintahan Desa Tahun2019

Nb	Uraian	Keterangan	Pendidikan/ Keterangan
1	2	3	4
1	Jumlah Aparat Pemerintah Desa	12 Orang	
2	Jumlah Perangkat Desa	10 Unit Kerja	
3	Kepala Desa	Ada	
4	Sekretaris Desa	Ada	
5	Kaur Keuangan	Ada	
6	Kaur Umum dan TU	Ada	
7	Kaur Perencanaan	Ada	
8	Kasi Pemerintahan	Ada	
9	Kasi Pelayanan	Ada	
10	Kasi Kesjahteraan	Ada	
13	Jumlah Staf	2 Orang	
14	Jumlah Dusun Di Desa	4 Dusun	
15	Jumlah Kepala Dusun yang Aktif	4 Orang	
16	Jumlah RW	16 RW	
17	Jumlah RT	62 RT	
	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA		
1	Keberadaan BPD	Ada	
2	Jumlah Anggota BPD	9 Orang	
	LEMBAGA EKONOMI DESA		
1	Jumlah BUMDes	1 Unit	
2	Jumlah Kelompok Tani	8 Kelompok	
3	Jumlah Kelompok Ternak	 Kelompok	
4	Jumlah Kelompok Simpan Pinjam	 Kelompok	

Struktur Organisasi Pemerintah Desa



3. MASALAH DAN POTENSI DESA

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil Musrenbangdes penyusunan RPJM Desa yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim dan sebagai data tambahan dilakukan upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.

Di bawah ini adalah daftar masalah dan potensi desa yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat.

a. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Masalah	Potensi
1	2	3
1	Pemerintah Desa kurang transparan terhadap masyarakat	Aparatur pemerintah desa lengkap dan SDM memadai
2	Pemerintah Desa kurang disiplin dalam menjalankan tugas	Pemerintah Desa Sudah mulai aktif
3	Musyawarah Desa kurang melibatkan kelompok masyarakat	SDM masyarakat sudah meningkat
4	Pelayanan Pemerintahan Desa terhadap masyarakat kurang maksimal	Adanya Kantor Desa dan SDM memadai
5	Pelayanan semua pengurus RT kepada masyarakat kurang maksimal	RT dan RW lengkap

1	2	3
6	Tata ruang di Pemerintahan Desa kurang optimal	Pemerintahan Desa, Aparatur Pemerintah Desa aktif
7	Kinerja dalam menjalankan tugasnya BPD kurang aktif, efektif dan inspiratif	BPD lengkap
8	Masih tidak adanya gapura di jalan masuk desa dan dusun	Batas-batas sudah jelas
9	Administrasi Pemerintah Desa belum rapi	Penataan arsip mulai dilakukan
10	Lemahnya keterlibatan Linmas dan RT/RW dalam menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan warga	Linmas dan RT/RW lengkap

b. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Masalah	Potensi
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

c. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

No	Masalah	Potensi
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

d. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Masalah	Potensi
1	2	3
1	Banyak Masyarakat RTSM yg belum terdata dengan baik	
2	Banyak Masyarakat miskin yang terlantar	
3	Pemberdayaan perempuan Kurang Maksimal	Kelompok perempuan Aktif, sdm memadai
4	Kelompok Tani di desa kertosari kurang maksimal	Kelompok Tani, Pelatih profesional
5	Kelompok Pemuda di Desa kertosari Kurang maksimal	Pemuda karang Taruna
6	Tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa belum tertata rapi	Perangkat Desa Aktif
7		
8		
9		
10		

No	Masalah	Potensi
1	Tidak ada poskamling di Semua Dusun di Desa kertosari	Patroli rutin masyarakat
2	Hansip kurang aktif dalam kinerja di Rw 1, Rw 3, Rw 5	
3	Di Rt 06/2, Rt 07/2 dan Rt 03/1 belum ada hansip	
4	Banyak Musholla di desa Kertosari belum mempunyai mck dan tempat Wudu	
5	Sarana penunjang di Masjid Belum Optimal	
6	MCK dan tempat wudhu di Masjid kurang Optimal	Masjid, saluran Air
7	Kegiatan Olah Raga masyarakat di Rw 5 tidak berjalan di desa kertosari tidak maksimal	
8	Belum adanya BUMDesa yang menangani masalah pompanisasi, pupuk, hasil panen	Adanya Kelompok Tani
9	Belum adanya Lumbung Desa	
10		

E. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Masalah	Potensi
1	Banyak Masyarakat RTSM yg belum terdata dengan baik	
2	Banyak Masyarakat miskin yang terlantar	
3	Pemberdayaan perempuan Kurang Maksimal	Kelompok perempuan Aktif, sdm memadai
4	Kelompok Tani di desa kertosari kurang maksimal	Kelompok Tani, Pelatih profesional
5	Kelompok Pemuda di Desa kertosari Kurang maksimal	Pemuda karang Taruna
6	Tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa belum tertata rapi	Perangkat Desa Aktif

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJMDES

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut :

1. Proses Pengkajian Keadaan Desa

a. Musyawarah Dusun/Kelompok

Penyusunan RPJM Desa di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di desa dengan menggunakan Alat Kajian :

1. Sketsa Desa
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah RW / Dusun yang telah dilakukan pada :

No	Musyawarah	Jadwal Pelaksanaan	Tempat pelaksanaan
1	2	3	4
1	Dusun Krajan	Sabtu, 04/01/2020	Di Rumh Bpk.Sutikno
2	Dusun Sumber Dandang	Minggu, 05/01/2020	Di Rumh Bpk.Eksan
3	Dusun Lamparan	Minggu, 05/01/2020	Di Rumh Bpk.Buang Slamet
4	Dusun Gempal	Sabtu, 05/01/2020	Di Rumh Bpk.Samsul. A

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat Dusun, Kemudian dituangkan dalam format daftar usulan dusun.

b. MUSYAWARAH DESA

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam musyawarah ditingkat Desa yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2020 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan Mengelompokan Masalah dari hasil musyawarah Dusun
2. Menyusun Sejarah Desa
3. Menyusun Visi dan Misi Desa
4. Membuat skala prioritas
 - Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.
5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.

- Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.

6. Menetapkan tindakan yang layak

- Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan yang merupakan skala Desa dan pembangunan supra Desa.

2. Musyawarah Desa RPJM-Desa

Musyawarah Desa RPJM-Desa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM- Desa.

Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Musyawarah Desa RPJM-Desa dilaksanakan pada hari ~~Jumat~~ ^{Januari} Tanggal .19. bulan ~~Desember~~ Tahun 2020

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa selanjutnya dilaksanakan Musrenbang penyusunan Desa RPJM Desa yang diselenggarakan pada hari ~~Jumat~~ ^{Januari} tanggal .17.. Januari 2020, bertempat di Balai Desa dalam rangka membahas rancangan RPJM-Desa Tahun 2020-2025.

BAB IV VISI DAN MISI

Dalam rangka melaksanakan roda pemerintahan desa agar memiliki kejelasan tujuan maka dirasa perlu untuk menetapkan arah pembangunan yang akan membawa kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.

Desa dalam sistem pemerintahan merupakan salah satu subsistem yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia. Pasal 5 (1) Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, RPJM Desa kami upayakan sebisa mungkin untuk menjadi perencanaan yang terpadu sesuai dengan RPJM Daerah Kabupaten Jember.

A. VISI DAN MISI

Diera sekarang ini dengan semakin luasnya kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa, mengharuskan setiap desa lebih kreatif dan inovatif dalam hal pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini kami rasakan tak mudah diwujudkan akibat beberapa permasalahan rumit yang kami hadapi. Permasalahan tersebut seperti relatif rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, antara lain : angka kemiskinan, jumlah pengangguran, derajat kesehatan yang rendah serta daya beli masyarakat yang rendah.

Dari uraian singkat tentang permasalahan diatas, dan guna mengatasi permasalahan tersebut diatas kami tetapkan Visi dan Misi Desa Kertosari Tahun 2019 - 2025, sebagai berikut :

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Desa Kertosari Yang Tentram, majun makmur dan berkeadilan serta berahlak mulia.

2. Misi

Misi yang diemban dalam mewujudkan Visi diatas adalah :

1. Meningkatkan Pelayanan yang lebih dekat serta mudah terhadap kepentingan masyarakat.
2. Meningkatkan dan Memfasilitasi Kegiatan keagamaan.
3. Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat, meliputi :
 - a. Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (SDM)
 - b. Pemberdayaan Sumberdaya Alam (SDA)
 - c. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

4. Menciptakan Kondisi Masyarakat Desa Kertosari yang : Aman, Tertib, Guyup, dan Rukun, dalam Kehidupan bermasyarakat dengan berpegang pada prinsip-prinsip yaitu :
 - a. Duduk Sama Rendah Berdiri sama Tinggi
 - b. Ringan Sama Dijinjing Berat sama dipikul, dan;
 - c. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, nrimo ing pandum
5. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kertosari yang meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Yang Transparan dan Akuntabel
 - b. Pelayanan Kepada Masyarakat yang prima yaitu : Cepat, Tepat dan Benar
 - c. Pelaksanaan Pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat
 - d. Majune Deso gumantung wargo guyup rukun, makaryo sapodo podo
6. Pemberdayaan pemuda dalam olah raga sehingga diharapkan prestasi dari pemuda-pemudi Desa Kertosari yang mengharumkan Desa Pada umumnya.
7. Menjaga serta melanjutkan sepenuhnya aktifitas beragama yang telah menjadi tradisi serta kebiasaan yang telah disepakati oleh masyarakat Desa Kertosari.
8. Bekerja sama dengan tokoh masyarakat, pemuda, serta tokoh agama dalam membina serta berkehidupan masyarakat yang lebih baik.
9. Melaksanakan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didanai oleh Pemerintah melalui program-program dan dilaksanakan dengan efektif, efisien, transparan dan Akuntabilitas.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa

1. Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan desa dalam rangka mewujudkan Visi dengan menjalankan Misi ditempuh dengan tiga strategi :

1.1 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Kreatif, Inovatif dan Berkualitas

Penyelenggaraan ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan umum dan pelayanan dasar kepada masyarakat agar terjadi kondisi masyarakat yang aman, nyaman, tertib serta adanya kepastian hukum. Strategi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengedepankan aparatur yang profesional, kreatif dan inovatif serta memaksimalkan fungsi sebagai fasilitator dan regulator.

1.2 Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

Pemberdayaan ini diarahkan pada peningkatan mutu pengetahuan umum dan agama, kesadaran hukum, kesehatan dan daya beli masyarakat serta menumbuhkembangkan dunia usaha khususnya yang berbasis potensi lokal.

Strategi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan disamping itu untuk meningkatkan gairah investasi, kepatuhan hukum, meningkatkan kondisi sosial ekonomi serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

1.3 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Buatan Secara Optimal

Pengelolaan ini diarahkan pada peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja.

2. Arah Kebijakan Desa

Berdasarkan Misi sebagaimana tersebut diatas, maka arah kebijakan pembangunan ditujukan kepada :

2.1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Dalam rangka pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan yang berkualitas, maka kebijakan pembangunan pada tahun 2020 s/d 2025 diarahkan kepada :

- a. Koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Pengembangan kualitas pelayanan administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia usaha;
- c. Peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan aparatur;
- d. Peningkatan kesejahteraan aparatur;

2.2 Ikut serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat

Dalam rangka pencapaian kinerja untuk ikut serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat tahun 2020 s/d 2025 diarahkan kepada :

- a. Peningkatan kesadaran wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. Pemberian beasiswa kepada pelajar berprestasi dan bantuan kepada pelajar kurang mampu;
- d. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan;
- e. Fasilitas kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menggunakan Askeskin dari tingkat puskesmas sampai dengan RSUD;
- f. Peningkatan sistem sanitasi umum yang ada di desa;
- g. Fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui posyandu;

2.3 Pengalihan Potensi Unggulan Desa

Dalam rangka pencapaian kinerja Pengalihan Potensi Unggulan Desa, maka kebijakan pembangunan pada tahun 2016 s/d 2021 diarahkan pada :

- a. Pemenuhan sarana dan prasarana pertanian (pengandaan Handtractor dan Diesel/pompa air);
- b. Fasilitas terhadap upaya petani dalam rangka peningkatan produktifitas dan mutu produk pertanian;

2.4 Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Dalam rangka pencapaian kinerja Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, maka kebijakan pembangunan periode tahun 2020 diarahkan pada :

- a. Fasilitas terhadap program kerja satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan kualitas lingkungan dan pemukiman keluarga miskin;
- c. Pemberdayaan perempuan;

2.5 Pembangunan Sarana dan Prasarana yang memadai

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan sarana dan prasarana yang memadai, maka kebijakan pembangunan periode tahun 2020 diarahkan pada :

- a. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi;
- c. Peningkatan pelayanan fasilitas yang menunjang pendidikan dan kesehatan
- d.

BAB V

RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Rumusan prioritas pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 6 tahun ke depan meliputi 4 bidang mendasar, yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Meningkatkan kualitas pendataan Desa agar diperoleh data yang valid
- b. Penambahan dan penyusunan tata ruang Desa khususnya di bagian pelayanan masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas dan penganggaran untuk kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa
- d. Meningkatkan pengelolaan informasi Desa dengan menggunakan internet dan website
- e. Meningkatkan penyelenggaraan perencanaan Desa dengan kegiatan tilik dusun secara periodik

- f. Mengembangkan jaringan dengan penyelenggaraan kerjasama antar Desa
- g. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain ; jalan pemukiman, jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian, lingkungan permukiman masyarakat Desa.
- b. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain ; air bersih berskala Desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan Desa (posyandu), sarana dan prasarana kesehatan Desa.
- c. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain ; taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain : pasar Desa, pembentukan dan pengembangan BUMDesa, penguatan permodalan BUM Desa, pembibitan tanaman pangan, lumbung Desa, kolam ikan dan pembenihan ikan, kandang ternak, instalasi biogas.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan pelestarian lingkungan hidup antara lain : penghijauan, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Meningkatkan pembinaan lembaga kemasyarakatan dengan mengikutsertakan dalam setiap event pelatihan
- b. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dengan melengkapi kebutuhan setiap pos kamling
- c. Penambahan dan pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- d. Meningkatkan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Meningkatkan kegiatan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan kerjasama dengan pihak ketiga
- b. Meningkatkan pelatihan teknologi tepat guna dan ikut serta dalam setiap event kegiatan
- c. Meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa.
- d. Meningkatkan kapasitas masyarakat, dengan mempersiapkan anggaran dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kelompok :

- ✓ kader pemberdayaan masyarakat Desa, kelompok usaha ekonomi produktif;
- ✓ kelompok pengrajin, kelompok pemuda.
- ✓ kelompok perempuan
- ✓ kelompok miskin

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA DAN PROGRAM KEGIATAN

1. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Dalam era otonomi daerah, setiap Desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap Desa dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Desanya masing-masing.

Prediksi dan Pendapatan Desa

Uraian Pendapatan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7
PA Desa	76.050.000	76.050.000	76.050.000	76.050.000	76.050.000	76.050.000
Dana Desa (DD)	1.065.248.291	1.095.000.000	1.115.000.000	1.145.000.000	1.195.000.000	1.215.000.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BGH)	86.989.000	88.989.000	92.989.000	96.989.000	98.989.000	101.989.000
Alokasi Dana Desa	818.440.000	826.440.000	856.440.000	896.440.000	936.440.000	986.440.000
Bantuan Keuangan dari Kabupaten	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Bantuan Keuangan dari Propinsi	250.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
Bantuan Keuangan dari pusat	100.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000
Hibah	-	-	-	-	-	-
Sumbangan Pihak Ke III	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2.446.727.291	2.461.479.000	2.515.479.000	2.589.479.000	2.681.479.000	2.754.479.000

a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

Kebijakan Keuangan Desa yang merupakan potensi Desa dan sebagai penerimaan Desa sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Desa;

2. Meningkatkan Pendapatan Desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Desa;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Desa;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan Desa;
6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan Desa.

b. Arah Kebijakan Belanja Desa

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Esensi utama penggunaan dana APBDesa adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perdes APBDesa secara tepat waktu pula.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai system pelaporan yang makin akuntabel.
3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Desa.
4. Alokasi Anggaran Desa Indikatif
Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi , Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas kegiatan maka kebijakana olokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :

Prediksi Alokasi Indikatif Belanja Desa

Uraian Pengeluaran	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	734.018.187	738.443.700	754.643.700	776.843.700	804.443.700	826.343.700
Pembangunan Desa	1.492.503.648	1.526.116.980	1.509.287.400	1.579.582.190	1.662.516.980	1.680.232.190
Pembinaan Kemasyarakatan	146.803.637	123.073.950	150.928.740	129.473.950	134.073.950	137.723.950
Pemberdayaan Masyarakat	73.401.819	73.844.370	100.619.160	103.579.160	80.444.370	110.179.160
Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
Biaya Tak Terduga	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	2.446.727.291	2.461.479.000	2.515.479.000	2.589.479.000	2.681.479.000	2.754.479.000

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah di Desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.

2. Program dan Kegiatan Indikatif

	Sub Bidang		Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW / Dusun)	Prakiraa n Volume
1	Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	6 Paket
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	6 Paket
		3	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	6 Paket
		4	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	6 Paket
		5	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa	Desa	6 Paket
		6	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perangkat Desa	Desa	6 Paket
		7	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD perlengkapan perkantoran pakaian dinas/atribut listrik/telpon dll)	Desa	6 Paket
		8	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	6 Paket
		9	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK makan-minum) perlengkapan perkantoran Pakaian Seragam perjalanan dinas listrik/telpon dll)	Desa	6 Paket
		10	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa	6 Paket
2	Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan		
		2	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan		
		3	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa	1 Paket
		4	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa	1 Paket
		5	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa	4 Paket
		6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		
		7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**		
		8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**		
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**		
		10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	Desa	2 Paket
		11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**		
3	Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Keluarga dll)		
		2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Desa	6 Paket
		3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan	Desa	6 Paket

			pemerintahan desa		
		4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		
4	Bidang Tata Praja Pemerintahan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes dll. bersifat reguler)	Desa	6 Paket
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus rembug warga dll. yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa	6 Paket
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDesdll)	Desa	6 Paket
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait)	Desa	6 Paket
		5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa	6 Paket
		6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Desa	6 Paket
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran laporan akhir masa jabatan laporan keterangan akhir tahun anggaran informasi kepada masyarakat)	Desa	6 Paket
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa	6 Paket
		9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten Pihak Ketiga dll)**		
		10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	Desa	2 Paket
		11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		
		12	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		
5	Bidang Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa		
		2	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)		
		3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
		4	Mediasi Konflik Pertanahan		
		5	Penyuluhan Pertanahan	Desa	1 Paket
		6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		
		7	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **		
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA					
1	Bidang Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian Seragam Operasional dst)	Desa	16 Paket
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE Sarana		

			PAUD dst)		
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **		
		5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**		
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**		
		7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Desa	3 Paket
		8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**		
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Desa	3 Paket
		10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**		
		11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**		
		12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Desa	2 Paket
		13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**		
		14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**		
		15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**		
		16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**		
		17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**		
		18	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	Desa	4 Paket
		19	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
		20	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
		21	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa	4 Paket
		22	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
		23	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		

		2 4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		
2	Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin dst)		
		2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin dst)		
		3	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin dst)		
		4	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Kelas Ibu Hamil Kelas Lansia Insentif Kader Posyandu)	Desa	50 Paket
		5	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Kelas Ibu Hamil Kelas Lansia Insentif Kader Posyandu)	Desa	50 Paket
		6	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Kelas Ibu Hamil Kelas Lansia Insentif Kader Posyandu)	Desa	50 Paket
		7	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Kelas Ibu Hamil Kelas Lansia Insentif Kader Posyandu)		
		8	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dll)	Desa	6 Paket
		9	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		
		1 0	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		
		1 1	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa		
		1 2	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		
		1 3	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		
		1 4	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
		1 5	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
		1 6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **		
		1 7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa	1 Paket
		1 8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa	1 Paket
		1 9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa	1 Paket
		2 0	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa	1 Paket
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Jalan Desa		

		2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
		3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
		4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	Desa	4 Paket
		5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Selokan Box/Slab Culvert Drainase Prasarana Jalan lain)		
		6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
		7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa		
		8	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
		9	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		
		10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **		
		11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	Desa	8 Paket
		12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	Desa	36 Paket
		13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	Desa	1 Paket
		14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **		
		15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **		
		16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **		
		17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **		
		18	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Selokan Box/Slab Culvert Drainase Prasarana Jalan lain) **		
		19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Selokan Box/Slab Culvert Drainase Prasarana Jalan lain) **	Desa	34 Paket
		20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**		
		21	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**	Desa	4 Paket
		22	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
		23	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
		24	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
		25	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
		26	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **		
		27	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		
		28	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **	Desa	2 Paket
		29	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **		
		30	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **	Desa	4 Paket
		31	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan		

		1	Monumen/Gapura/Batas Desa **		
4	Bidang Kawasan Permukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan validasi dll)		
		2	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		
		3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor dll)		
		4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi dll)		
		5	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong Selokan Parit dll. diluar prasarana jalan)		
		6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dll	Desa	4 Paket
		7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan Bank Sampah dll)		
		8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase Air limbah Rumah Tangga)		
		9	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
		10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **		
		11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **		
		12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor dll)**	Desa	4 Paket
		13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor dll)**		
		14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi dll) **	Desa	1 Paket
		15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi dll) **		
		16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong Selokan Parit dll. diluar prasarana jalan) **	Desa	2 Paket
		17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong Selokan Parit dll. diluar prasarana jalan) **		
		18	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dll **	Desa	4 Paket
		19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dll **		
		20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan Bank Sampah dll)**	Desa	40 Paket
		21	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan Bank Sampah dll)**		
		22	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase Air limbah Rumah Tangga)**		
		23	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase Air limbah Rumah Tangga)**		
		24	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		

		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		
		5			
5	Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
		2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		
		3	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		
		4	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
6	Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
		2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga dll)	Desa	6 Paket
		3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		
7	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **		
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **		
8	Bidang Pariwisata	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **		
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **		
		4	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					
1	Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	Desa	5 Paket
		2	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **		
		3	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa	6 Paket
		4	Koordinasi Pembinaan Ketentraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah dll) Skala Lokal Desa		
		5	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa	5 Paket
		6	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Desa	1 Paket
		7	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Desa	1 Paket
		8	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat		

2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa	6 Paket
		2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota		
		3	Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besar keagamaan dll) tingkat Desa		
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **		
		5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **		
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **		
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota		
		2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan Penyadaraan Wawasan Kebangsaan dll) tingkat Desa		
		3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa		
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**		
		5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa	6 Paket
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa	1 Paket
		7	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa	6 Paket
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan Lembaga Adat		
		2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa	6 Paket
		3	Pembinaan PKK	Desa	6 Paket
		4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa	6 Paket
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
		2	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**		
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**		
		5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**		
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**		
		7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**		
		8	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		
		9	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **		

2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian penggilingan Padi/jagung dll)	Desa	6 Paket
		2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan kandang dll)	Desa	6 Paket
		3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)		
		4	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)		
		5	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
		6	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	Desa	1 Paket
		7	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa	6 Paket
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa	6 Paket
		3	Peningkatan kapasitas BPD	Desa	6 Paket
4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa	6 Paket
		2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa	6 Paket
		3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)		
5	Sub Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Desa	4 Paket
		2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi		
		3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian		
6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)		
		2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Desa	5 Paket
7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa		
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **		
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **		
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **		
		5	Pengembangan Industri kecil level Desa	Desa	4 Paket
		6	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin pedagang industri rumah tangga dll) **	Desa	6 Paket
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
1	Sub Bidang	1	Penanggulangan Bencana		

DESA KERTOSARI

	Penanggulangan Bencana				
2	Sub Bidang Keadaan Darurat	2	Keadaan Darurat		
3	Sub Bidang Keadaan Mendesak.	3	Keadaan Mendesak		
	PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BENCANA DAN MENDESAK DESA				
1	Pembiayaan	1	Penyertaan Modal		
	PEMBIAYAAN				
	BIAYA TAK TERDUGA				

3. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja yang ingin dicapai meliputi hal-hal sebagai berikut :

Matrik Indikator Kinerja

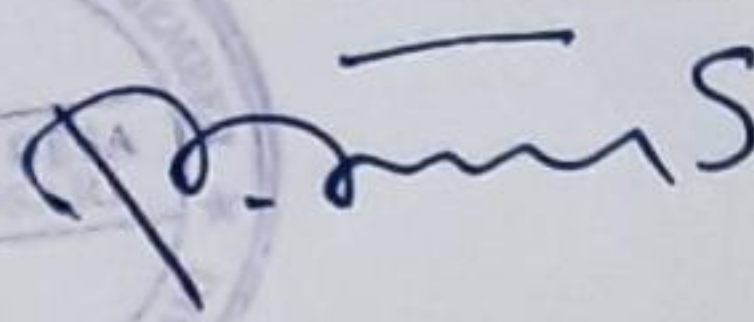
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penyelenggaraan Pemerintahan							
1	Penyusunan RKPDes Tepat Waktu	Tepat/Tidak	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2	Pengesahan APBDes Tepat Waktu	Tepat/Tidak	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
3	Kepemilikan Kartu Keluarga	%	85	87	90	93	96	99
4	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	5	5	4	4	3	3
5	Angka Putus Sekolah Dasar	%	30	25	20	15	10	5
6	Angka Putus Sekolah Menengah	%	40	35	30	25	20	15
7	Angka Putus Sekolah Atas	%	50	45	40	35	30	25
8	Penduduk Miskin	%	10	9	8	7	6	5
9	Index Kepuasan Masyarakat	A/B/C/D	B	B	A	A	A	A
2	Pelaksanaan Pembangunan							
1	Cakupan Pelayanan Posyandu	%	90	93	96	99	99	99
2	Angka Kematian Ibu dan Anak	%	0	0	0	0	0	0
3	Ruas Jalan Desa Kondisi Baik	%	50	60	70	80	90	100
4	Drainase Jalan Desa Kondisi Baik	%	50	60	70	80	90	100
5	Rasio Jaringan Irigasi	%	50	60	70	80	90	100
6	Rumah Tidak Layak Huni	%	50	60	70	80	90	100
7	Rumah Memiliki Jamban Keluarga	%	50	60	70	80	90	100
8	Cakupan Pemenuhan Air Bersih	%	50	60	70	80	90	100
9	Tempat Pembuangan Sampah	%/RT	50	60	70	80	90	100
3	Pembinaan Kemasyarakatan							
1	Partisipasi Perempuan di Pemerintahan	%	15	20	25	30	35	40
2	Partisipasi Perempuan di Lembaga Kemasyarakatan	%	15	20	25	30	35	40
3	Jumlah Kasus Pencurian	Kasus	0	0	0	0	0	0
4	Jumlah Kasus Miras dan Narkoba	Kasus	0	0	0	0	0	0
4	Pemberdayaan Masyarakat							
1	Cakupan Jumlah KPMD	%	25	30	35	40	45	50
2	Proses Pendirian Pembentukan BUMDes	%	50	100	100	100	100	100
3	Cakupan Pelatihan Aparat Pemerintah Desa	%	40	50	60	70	80	90
4	Cakupan Pelatihan Kelembagaan Masyarakat	%	40	50	60	70	80	90

BAB VII PENUTUP

Demikian RPJMDes ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Tahun 2019 - 2025 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa yang merupakan hasil Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMDesa Tahun 2020 - 2025 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

Dokumen RPJMDesa Tahun 2020 - 2025, gugur secara hukum apabila ada Penyelenggaraan Pilkades dan Kades difinitif dilantik.

 **KEPALA DESA KERTOSARI,**

BUDI WIJAYANTO